



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHRISTINA SHANDRA TOBONDO
2. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. NHK : 486893

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.572.542.000

1. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/147 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 146.381.000
4. Tanah Seluas 591 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 91.605.000
5. Tanah Seluas 593 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 91.915.000
6. Tanah Seluas 1609 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 249.395.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 526 m2/402 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 436.046.000
8. Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 64.200.000
9. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/264 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 223.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 128.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI



Rp. 120.500.000

2. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC SCOOTER Tahun 2010, HASIL

SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 12.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.713.042.000

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.713.042.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.